

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO DI DESA BLOK
SEPULUH KECAMATAN DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

**OLEH
SRI NURHAYATI HASIBUAN
188510075**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/12/22

**IMPLEMENTASI PROGRAM PROGRAM SEMBAKO DI
DESA BLOK SEPULUH KECAMATAN DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

**OLEH:
SRI NURHAYATI HASIBUAN
188510075**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Program Sembako Di Desa Blok 10
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang
Bedagai

Nama Mahasiswa : Sri Nurhayati Hasibuan

NPM : 18.851.0075

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP


Marlina Deliana S.AB.MAB

Mengetahui:


Dekan

Dr. Efflati Juliana Hasibuan, M.Si

Kaprodi Ilmu Pemerintahan


Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Tanggal Lulus : 04 Oktober 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Nurhayati Hasibuan
Npm : 188510075
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demikian mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Nonklasifikasi (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Program Sembako Di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Hak Bebas Royalti Nonklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: 13 Oktober 2022

Yang Menyatakan



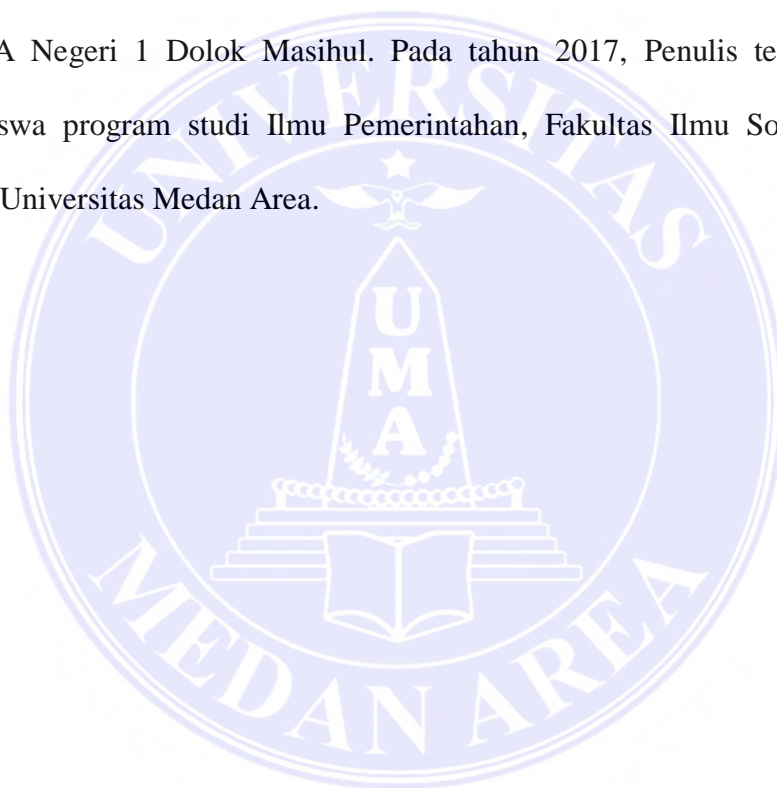
Sri Nurhayati Hasibuan

188510075

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sri Nurhayati Hasibuan, anak dari Halasan Hasibuan dan Alm. Lamria Pasaribu. Lahir di Desa Blok 10 Dusun IX pada 01 September 1999, Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah dasar Negeri 102069 di desa blok 10 pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2011 penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Dolok Masihul, kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Dolok Masihul. Pada tahun 2017, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Salah satu diantara masalah di Indonesia adalah kemiskinan dimana kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Program sembako merupakan program bantuan subsidi sembako dari pemerintah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) dikarenakan masyarakat desa blok sepuluh terdapat suatu masalah yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi di desa blok sepuluh dan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat dan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Sembako Di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, untuk mengetahui bagaimana dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan program Sembako. Penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi Program Sembako di desa blok sepuluh belum berjalan dengan baik. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Van Meter dan Van Horn (1975) terdiri dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik. Masih banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan program Sembako yaitu lemahnya fungsi pengawasan terhadap dalam penetapan daftar nama-nama Rumah Tangga Sasaran sehingga daftar tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kurangnya koordinasi dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Program Sembako Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

One of the problems in Indonesia is poverty where poverty is a lack of welfare. The basic food program is a basic food subsidy program from the government for low-income communities or Target Households (RTS) because the community in the village of block ten has a problem, namely the high poverty rate in the village of block ten and as a form of government effort to help the community and to improve food security. This study aims to find out how the Sembako Program Implementation in the Sembako Block Village, Dolok Masihul District, Serdang Bedagai Regency, to find out how the support and obstacles in the implementation of the Sembako program are. This research is a qualitative descriptive approach. The results of this study explain that the implementation of the Sembako Program in the village of Blok ten has not been going well. The theory used in this study is Van Meter and Van Horn (1975) consisting of indicators of policy size and objectives, resources, communication between organizations and strengthening activities, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, social and political economic environment. There are still many obstacles in the implementation of the Sembako program, namely the weakness of the supervisory function in determining the list of names of Target Households so that the list does not match the actual situation, lack of coordination and lack of socialization to the community

Keywords: Implementation, Community Welfare Basic Food Program

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang judul “ Implementasi Program Sembako Di Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai“.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata satu (SI) Program Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kemampuan yang ada masih banyak terdapat kekurangan dan mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun maupun mengarah kepada penyempurnaan Skripsi ini. Sehingga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan kerjasama baik secara materi maupun moral dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing. maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.Sc
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos. M.Ipol. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos. M.AP selaku dosen pembimbing 1 (pertama) yang telah banyak banyak meluangkan waktu pikiran dan tenaga

dalam memberikan bimbingan maupun saran kepada penulis.

5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku pembimbing II (kedua) yang telah memberikan banyak saran sehingga penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Fuad Putra Ginting, S.Sos, M.Ip selaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dan memberikan pengetahuan kepada penulis dalam skripsi ini.
7. Bapak/ibu dosen beserta staff pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi selama perkuliahan kepada penulis.
8. Bapak Suhardi selaku Kepala Desa Blok 10, Ibu Efi Aspita selaku sekretaris desa blok 10, dan masyarakat desa blok 10 yang telah membantu memberikan informasi selama pelaksanaan penelitian dilakukan.
9. Orang tua tercinta, Ibunda Alm. Lamria Pasaribu yang memberikan doa tulus dan semangat kepada penulis, dan Ayahanda Halasan Hasibuan yang telah menguatkan penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan pendidikan ini dan juga yakni Abang sulung Wandi Hasibuan, Abang ke dua Joni Roy Hasibuan, dan Adik tersayang Immanuel Hasibuan.
10. Rekan-rekan mahasiswa stambuk 2018 program Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan moral dalam penulisan skripsi ini.

Atas bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus sebesar-besarnya. Semoga Tuhan melimpahkan berkatnya serta membalas budi yang telah diberikan kepada penulis.

Dengan ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 04 Oktober 2022

Sri Nurhayati Hasibuan



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	xiii
PENDAHULUAN	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 Pengertian kebijakan publik	4
2.1 Implementasi	5
2.2.1 Pengertian Implementasi	5
2.2.2 Model Implementasi.....	8
2.3 Konsep Program Sembako	14
2.3.1 Pengertian dan Sejarah Program Sembako	14
2.3.2 Pengertian Kartu Keluarga (KKS).....	16
2.3.3 Fungsi dan Tujuan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera	17
2.5 Pengertian Kemiskinan	21
2.5.1 Bentuk-bentuk kemiskinan	
2.5.2 Penanggulangan Kemiskinan	
2.6 Pelaksanaan Distribusi Program Sembako	24
2.7 Studi Relevan	25
2.8 Kerangka Berfikir.....	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian	

3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3	Informan Penelitian	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5	Metode Analisi Data.....	34
BAB IV		35
4.1.	Hasil Penelitian	35
4.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Peneitian.....	35
4.1.2	Visi dan Misi Pemerintahan Desa Blok 10.....	36
4.1.3.	Struktur Bagan Organisasi Pemerintahan DESA BLOK 10	37
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai	37
4.2	Implementasi Program Sembako Di Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai	39
4.2.1	Akurasi Data/ Sasaran	40
4.2.2	Sumber Daya.....	43
4.2.3	Komunikasi Antar Organisasi	45
4.2.4	Karakteristik Agen Pelaksana.....	47
4.2.5	Ukuran dan Tujuan.....	49
4.2.6	Sikap Pelaksana.....	52
4.3.	Faktor Penghambat Implementasi Program Raskin.....	53
BAB V		56
5.1	Kesimpulan	57
5.2.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian	29
Bagan 4.1 : Struktural Organisasi Kantor Kepala Desa Blok Sepuluh	38



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seorang individu tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana taraf hidup seseorang individu mengalami kekurangan atau memiliki harta benda untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, individu yang tergolong kedalam kategori masyarakat miskin, tentunya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhana hidup sehari-hari mereka.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam penemuan kebutuhan hidup masyarakat miskin adalah Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini diperuntukan untuk keluarga kurang mampu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Pemberian Program Sembako dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) selama ini menimbulkan kecemburuan di masyarakat karena pembagian kartu yang belum tepat sasaran dan belum merata. Sesuai dengan kasus, ada masyarakat yang menerima kartu dan ada masyarakat yang tidak menerima kartu padahal kondisi sosial ekonominya yang sama persis. Target atau sasaran

Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari keluarga miskin masyarakat yang berpenghasilan rendah bantuan ini tujuannya untuk mengurangi masalah keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Pentingnya Implementasi Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dijalankan oleh dinas social dalam pelaksanaan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari besarnya nominal yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat dalam satu program bantuan sosial masyarakat masih banyak menggunakan uang bantuan yang diserahkan tidak dipergunakan sebagai mana mestinya, dan masih ada penerima Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang kondisi ekonominya tergolong masih baik padahal masih banyak warga yang lebih layak untuk dapat menerima Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kecamatan Dolok Masihul memiliki 27 Desa dan 1 Kelurahan dan setiap Desa dan Kelurahan memiliki Dusun dan Lingkungan (untuk kelurahan) sehingga jumlah dusun dan Lingkungan sebanyak 111 Dusun dan 8 Lingkungan dengan jumlah penduduk 53.886 jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019. Desa Blok 10 adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Dolok Masihul. Desa Blok 10 di bagi menjadi 9 dusun. Setiap desa dipimpin oleh kepala lorong(kepala lingkungan) sembilan desa ini di pimpin oleh kepala desa yang menjadi kepala yang tertinggi, Sembilan desa ini masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani. Jadi di desa blok 10 terdapat jumlah keluarga miskin (kurang mampu) tercatat sebanyak

300/kk.

Akan tetapi ada berbagai permasalahan yang muncul dalam pendataan bantuan Sembako yang ada dimasyarakat desa blok 10 Kabupaten Dolok Masihul yaitu kurangnya keefektifan dalam pendataan sehingga program Sembako tersebut tidak tepat sasaran, pelayanannya belum maksimal sehingga masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru tidak dapat bantuan sembako. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil lokasi tersebut unntuk penelitian di Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai karena masih banyak yang belum dapat bantuan di desa tersebut dan tempat lokasi nya tidak memakan waktu yang lama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana Implementasi Program Sembako di Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Serta apa yang menjadi faktor penghambat program Sembako di Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang bedagai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Sembako di wilayah Desa Blok 10.
2. Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Program Sembako di Desa Blok 10.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui sejauhmana impementasi program sembako di wilayah desa Blok 10 .
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Implementasi Program Sembako di Desa Blok 10.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial, khususnya di bidang ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak terkait, terutama pemerintah daerah dan khususnya Tim penyaluran Sembako pemerintah tingkat bawah, yaitu pemerintah di lingkungan desa blok 10 untuk melakukan penataan terhadap manajemen distribusi penyaluran agar tetap sasaran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun

untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saing tergantung, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Kebijakan publik bertujuan untuk mewujudkan martabat manusia baik secara teori maupun fakta.

Kebijakan publik salah satu pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Pakar kebijakan publik lainnya juga mengemukakan hal yang sama, bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

2.2 Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam

(2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi yaitu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena atau target yang hendak dicapai.

Badan-Badan tersebut dalam melaksanakan Pekerjaan-Pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Mazmanian dan Sebastiar (2001) dalam (wahab 2001:68) juga mendefinisikan Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier,

implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-undang dan juga bisa berbentuk perintahh atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *outputnya* adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya samapai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap bagus.

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Adanya keputusan tersebut, dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya dengan baik.

Menurut Winarno (2010:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bhwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Sementara menurut Mulyadi (2015:12), implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan dalam kebijakan. Tindakan yang dilakukan tersebut untuk mengubah keputusan-keputusan yang menjadi pola operasional serta

berusaha semaksimal mungkin dalam membuat perubahan besar atau kevil salam sebuah kebijakan tersebut.

Menurut Purwanto (Kapioru, 2014:13) beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Ketetapan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan).
- c. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.
- d. Kondisi lingkungan georafii, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang tercantum dalam bentuk undang- undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan dari sebuah konsep,kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis dan disahkan oleh sebuah pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian menuju kearah yang lebih baik.

2.2.2 Model Implementasi

Berbagai model dalam implementasi kebijakan baik terkait dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan dan tingkat kemejemukan yang dihadapi di masyarakat.

Adapun model dari implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) diidentifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah terealisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur, karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita diperlukan dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen. Tetapi, dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus didedukasikan oleh peneliti perorangan. Pada akhirnya pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

2. Sumber daya

Keberhasilan Implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusi,

sumber daya financial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat menyadarkan pada bagian sanksi baik positif maupun negative.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan, karakteristik agen pelaksana ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan napa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan.

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
 - b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-uni dan proses-proses dalam badan pelaksana.
 - c. Sumber-sumber politik suatu organisasi, misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif.
 - d. Vitalitas suatu organisasi.
 - e. Tingkat komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu diluar organisasi.
 - f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
5. Sikap para pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-presepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka mungkin mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu, kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut dan begitu sebaliknya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan system nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

6. Lingkungan ekonomi sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Marile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementasi*). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motode.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan

melalui aktivitas intansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (*dalam buku winarno*), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsesus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteistik yang paling setidaknya dalam dua hal :

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakn menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan- perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (*rasional*), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Iplementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur adminitratif.

2.3 Konsep Program Sembako

2.3.1 Pengertian dan Sejarah Program Sembako

Program – program bantuan pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bagi masyarakat yang kategori miskin (Darmi, T. Mujtahid. M.M. 2019). Salah satu adalah program bantuan sembako ini, yang merupakan program bantuan sosial pangan yang diadakan Pemerintah Kota sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk mengatasi dampak pada masyarakat. Target dari program ini tentunya masyarakat bagi yang kurang mampu. Program ini dilakukan untuk dapat meringankan beban masyarakat Oleh karena itu pemerintah membuat program pembagian Sembako guna meringankan beban masyarakat.

Program Sembako adalah pembangunan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program perubahan bantuan pangan untuk memastikan program ini lebih tepat pada sasaran, jumlah, waktu, kualitas, administrasi. Sama seperti Program Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako juga diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat untuk memilih jenis, kualitas harga dan tempat membeli bahan pangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan social secara nontunai dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang menjadi Dasar Hukum Program Sembako yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai alat untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis kebutuhan

apa saja yang dapat dibeli agar tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun juga kebutuhan pokok lain yang mengandung sumber protein hewani, protein nabati, karbohidrat, maupun vitamin dan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kandungan gizi.

Program Sembako ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, yang termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur non-tunai. Sinyal yang kurang baik, dan akses geografis, dengan memberlakukan sarana khusus untuk wilayah dengan kendala akses tersebut.

Bantuan Program Sembako diberikan melalui sistem perbankan, yang diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif untuk masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka itu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di perbarui menjadi Program Sembako memperluas jenis kebutuhan pokok lain tidak hanya beras dan telur saja. Jumlah bantuan yang semula Rp.110/bulan naik menjadi Rp.200.000/bulan. Adanya Program Sembako diharapkan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar keluarga miskin terpenuhi. Selain itu pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari Program Sembako ini akan mampu meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini agar memiliki pengaruh terhadap penurunan masalah kekurangan gizi.

Program Bantuan Pangan Non Tunai berperan sebagai pengentas

kemiskinan yang khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu, yang mana penerimaan bantuan ini memaknai kebutuhan pokok. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan adanya bantuan tersebut bisa mempermudah atau proses dalam penyaluran yang sebelumnya tidak menggunakan ATM dengan adanya BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) proses penyaluran tersebut bisa diakses dengan mudah. Mungkin dengan adanya Kebijakan pemerintah dalam program Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bisa mempermudah atau membantu dalam penyaluran bantuan tersebut terhadap masyarakat atau KPM (Kelompok Penerima Manfaat) dan bisa membantu untuk mempermudah masalah kebutuhan pokok atau pangan sehari-harinya. Alat pembayaran elektronik untuk Program Sembako ini adalah Kartu Keluarga Sejahtera yang disebut KKS. Bank penyaluran Program Sembako adalah bank umum yang dimiliki negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan.

2.3.2 Pengertian Kartu Keluarga (KKS)

Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening bagi masyarakat kurang mampu yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Media yang digunakan sebagai alat penyaluran dan bantuan Program Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Diberlakukannya metode pencarian bansos non tunai ini menggunakan buku tabungan dan kartu KKS adalah upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan, sistem penyaluran non-tunai akan disalurkan ke

rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kartu KKS ini memiliki fitur saving account dan e-wallet yakni satu kartu dapat digunakan berbagai program bansos, seperti Program Keluarga Sejahtera (KKS).

Secara nasional penerima KKS telah mencapai 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yang terdiri dari satu (1) juta keluarga diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian *simcard*, dan sisahnya sebanyak 14,5 juta keluarga diberikan dalam bentuk giro pos secara bertahap di tahun 2015. Setiap keluarga diberikan sebanyak 200 ribu per bulan per keluarga yang diisi setiap 1 bulan sekali. Untuk tahap awal, pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), *simcard* berisi uang elektronik.

Untuk memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial, pemerintah memutuskan untuk memberikan dalam bentuk simpanan. Alasan pemberian dalam bentuk simpanan adalah:

1. Simpanan atau tabungan merupakan bentuk kegiatan produktif.
2. Simpanan atau tabungan merupakan bagian dari strategi nasional keuangan Inklusif.
3. Perbaikan dari program BLSM 2013 yang sekedar membagikan uang tunai.
4. Mengurangi antrian.

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera

1. Fungsi Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Kartu Keluarga Sejahtera ini sebagai penanda bahwa si pemegang kartu ini berhak menerima bantuan uang dari pemerintah. Dan si pemilik kartu KKS akan di berikan SIM Card yang bisa dipasang di handphone untuk mengecek saldo. Fungsi SIM Card ini mirip dengan rekening bank. Untuk mengambil uang bantuan dari pemerintah tersebut, bisa ke kantor pos terdekat dengan menunjukkan nomor SIM Card tersebut. Layanan ini biasa di sebut e-money atau layanan keuangan digital.

2. Tujuan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Untuk mengurangi beban Keluarga penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga penerima Manfaat (KPM).
3. Meningkatkan ketetapan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan tepat administrasi.
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

2.4 Penerima Program Sembako Dengan Menggunakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Penerima manfaat Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah di daerah pelaksanaan, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) ditetapkan oleh KPA di kementerian sosial. Melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) menu BSP yaitu sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.

Untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) SIKS-NG menu

1. Nomor Kartu Keluarga (KK)
2. Tempat lahir dari pengurus Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
3. Nama gadis ibu kandung dari pengurus Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
4. Nomor peserta PKH,
5. Status PKH
6. Nama Kepala Keluarga
7. Nama anggota keluarga lain
8. Alamat tempat tinggal keluarga.
9. Kode wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).

Penerima Program Sembako adalah keluarga, namun untuk kebutuhan penyaluran Manfaat Program Sembako perlu ditentukan satu nama dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai pengurus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menjadi pemilik bantuan pangan. Pengurus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditentukan menurut urutan sebagai berikut :

1. Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga sebagai kepala keluarga ataupun sebagai pasangan kepala keluarga.
2. Jika tidak ada perempuan di dalam keluarga, sebagai kepala keluarga ataupun sebagai pasangan kepala keluarga, maka pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM) adalah anggota keluarga perempuan yang berumur di atas 17 tahun dan juga memiliki dokumen identitas kependudukan.
3. Jika Keluarga penerima Manfaat (KPM) tidak memiliki anggota perempuan di atas 17 tahun dan memiliki anggota perempuan, maka pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM) adalah laki-laki yang menjadi kepala keluarga.
4. Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada di dalam keluarga. Maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM).
5. Jika Keluarga penerima Manfaat (KPM) tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun ke atas dan memiliki dokumen identitas kependudukan, maka Keluarga penerima Manfaat (KPM) dapat di wakikan

oleh anggota keluarga yang lain di dalam satu Kartu Keluarga sebagai pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM).

2.5 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara umum merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah – tengah masyarakat, kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah dan bermatra multidimensional. Menurut Nugroho dan Dahuri 2012 :184, kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut dan relatif di suatu wilayah dimana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mencukupi kebutuhan dasar sesuai tata nilai yang berlaku.

Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjukkan pada gap antara lemahnya *purchasing power* dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat, keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

2.5.1 Bentuk-Bentuk Kemiskinan

1. Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan dimana orang – orang miskin memiliki pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dengan melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nilai kebutuhan

minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan di golongan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan Relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu di sesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu, karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya keadaan yang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin Karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, manusia, maupun pembangunan, atau kalau mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan rendah. Menurut Baswir, kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor – faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, menurut Kartasasmita disebut sebagai “*persisten poverty*” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun.

3. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok, masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki, dan mengubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah, menurut ukuran ukuran yang dipakai secara umum.
4. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor – faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya Sumodiningrat mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

2.5.2 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat

memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- b. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak – hak dasar.
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial, memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas – luasnya dalam pemenuhan dan hak – hak dasar dan peningkatan mutu hidup secara berkelanjutan
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman, atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

2.6 Pelaksanaan Distribusi Program Sembako

Menurut Cahyono pelaksanaan program sembako di desa atau di daerah dilaksanakan melalui kepala Desa/Lurah setempat. Adapun pelaksanaan distribusi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan, pelaksana distribusi sembako berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setempat.
- b. Tugas dan pelaksana distribusi program raskin bertujuan untuk memeriksa, menerima dan menyerahkan beras serta menerima uang pembayaran.
- c. Penyelenggara yang menerima HPB sembako secara tunai harus menyetorkan rekening bank yang telah di tunjuk atau ditetapkan oleh perum bulog atau melakukan penyetoran langsung secara tunai.
- d. Penyerahan rakin dari pihak penyelenggara kepada masyarakat dilakukan dengan cara serah terima.
- e. Memfalisasi musyawarah desa guna melakukan penetapan masyarakat yang mendapatkan bantuan raskin.

2.7 Studi Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Judul yang akan peneliti kaji berbeda dari penelitian sebelumnya, tetapi terdapat kemiripan dengan penelitian terdahulu. Adapun kemiripannya, diantaranya pada penelitian.

Tabel 2.1

Ringkasan Landasan Teori Penelitian

NO	PENELITI	JUDUL	KESIMPULAN
1	Adela anggleni (2018)	<i>“Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang”</i>	Penelitian ini menunjukkan bagaimana upaya pemerintah melaksanakan kebijakan program kartu keluarga sejahtera dilakukan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kemiskinan belum berjalan efektif dalam pelaksanaan karena beberapa faktor seperti warga miskin belum ikut serta, kurangnya sosialisasi dan koodinasi dari pemerintah untuk kebijakan sehingga data penerima program kurang tepat, yang menimbulkan kecemburuan sosial dalam pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera (KKS).
2	Ana Rosaliana	<i>“Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kecamatan wonocolo, kota surabaya.”</i>	Jenis penelitian menunjukkan bahwa telah terlaksana secara tepat waktu, baik penyaluran bantuan dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM), dan penyaluran dana bantuan operasional dari e-warong yang dikelola oleh pemerintah. .

3	Nurmalisa dan Hakim (2018)	<i>“Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik”.</i>	Penelitian ini menggunakan metode deskripsif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BNTP) di Kelurahan Gulak Galik berdasarkan persepsi masyarakat penerima manfaat program BPNT sudah berjalan aktif.
4	Ranchman dan Agustian (2018)	<i>“Efektivitas dan Perpesktif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam transformasi pola subsidi (Program Rasta) menjadi pola bantuan sosial (program BPNT) merupakan Langkah maju untuk mengurangi penyimpanan program.

2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan garis pemikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dari awal, melalui proses pelaksanaan hingga akhir

Kerangka berpikir juga diartikan sebagai hubungan antarvariabel yang disusun oleh teori yang diuraikan kemudian di analisis lagi secara sistematis untuk untuk mensistensiskan hubungan antar variable penelitian. Kerangka pemikiran alur pemikiran penulis sendiri atau bahkan suatu teori yang dianggap relevan atau berfokus untuk menanggapi permasalahan yang muncul dalam perumusan masalah peneliti.

Penulis mengambil teori model implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun indikator-indikator implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Sikap para pelaksan
6. Akurasi Data/sasaran

Adapun kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian untuk mencapai hasil yang optimal harus

menggunakan metode penelitian yang tepat. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Program Beras Raskin Di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut sugiyono (2014:9). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat (sebagai positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data dengan gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Selanjutnya, menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:5) penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus bagian yang penting dalam perkembangan peradapan manusia. Metode penelitian ini dengan cara ilmiah (rasional, empiris dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 13), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu

fenomena. Kebijakan atas suatu masalah dapat menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran serta pemerintah untuk memberikan implementasi dari suatu kebijakan, harus sesuai dengan kebutuhan rakyat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelitian di bagian Implementasi Program Beras Raskin di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun tahapan perincian kegiatan yang dilakukan sebagaimana tertera pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan ke :											
		Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Agu 2022	Sep 2022
1.	Penyusunan proposal												
2.	Seminar proposal												
3.	Perbaikan proposal												
4.	Pengambilan data/penelitian												
5.	Penyusunan skripsi												

6.	Seminar hasil												
7.	Perbaikan skripsi												
8.	Sidang meja hijau												

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara medalam. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan kunci

Menurut pendapat Afrizal (2016:139) informan kunci merupakan informasi yang didapatkan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat oleh penelii, informan kunci penelitian ini adalah kepala desa Bapak Suhardi blok sepuluh.

b. Informan utama

Menurut pendapat Afrizal (2016:139) informan utama ialah orang yang mengetahui secara teknis dan detail mengenai masalah penelitian yang akan diteliti. Yang menjadi informan utamanya yaitu sekretaris desa Epi Aspita program sembako di desa blok sepuluh dan Ibu Manganju Siregar selaku kepala dusun

c. Informan tambahan

Menurut pendapat Afrizal (21016:139) informan tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam melakukan penelitian kualitatif dari orang yang dapat memberikan informasi tambahan. Informan tambahan penelitian ini adalah masyarakat ibu Rose Sihombing, Ibu Basaria dan ibu Herti simamora di desa blok sepuluh sebagai penerima bantuan sembako.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulang data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang alami, bahkan kita sering melakukannya, baik secara sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apa pun, termasuk penelitian kualitatif dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian.

b. Wawancara

Menurut Arikunto (2013: 155), wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh iformasi dari yang diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab denga cara tatap muka antara pewawancara dan informan agar memperoleh data,

keterangan, pandangan, serta pendapat dari respon agar diperoleh informasi.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

3.5 Metode Analisi Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018: 428) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian ini, metode analisi data yang digunakan adalah model *Miles dan Huberman*.

a. Pengumpulan Data merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

b. Penyajian Data dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Blok Sepuluh mengenai Implementasi Program Sembako Di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Program sembako di Desa Blok Sepuluh Sepuluh dengan menggunakan indikator dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan, akurasi data/sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sumber daya, sikap pelaksana. Masih belum dikatakan berjalan dengan baik. Karena program Sembako ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras, tetapi penyaluran raskin sering terlambat hingga membuat masyarakat penerima bantuan Program Sembako sangat kecewa., sehingga tujuan program sembako bisa memenuhi sebagian kebutuhan pangan beras yang belum terimplementasi dengan baik.
2. Faktor penghambat yang dihadapi dikantor desa blok sepuluh dalam penanganan program Sembako di kecamatan dolok masihul kabupaten serdang bedagai yaitu kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk meningkatkan sumber daya aparatur di desa blok sepuluh

hendaknya diadakan penyuluhan/sosialisai yang lebih intens terhadap masyarakat mengenai program Sembako.

2. Diharapkan kepada aparaturnya di desa blok sepuluh dapat dilakukan pengkajian ulang atau kesiapan program dalam memperbaiki kinerja aparaturnya mengenai implementasi program Sembako, agar permasalahan-permasalahan dalam program ini dapat segera diselesaikan sehingga desa blok sepuluh dapat menerima Sembako secara rutin setiap bulannya.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat membuat Kebijakan mengenai bantuan Sembako untuk dikelola dengan baik, dan kiranya lebih diperhatikan lagi pemberian program bantuan Sembako ini agar tidak salah sasaran. Dan seharusnya data-data penerima tetap Bantuan Program Sembako dapat di kelola kembali dengan melakukan survey ulang atau pendataan ulang dengan mengupdate data minimal 1 tahun sekali agar program raskin ini dapat di terima oleh rumah tangga miskin yang tepat.
4. Melakukan pengawasan pada saat melakukan pendataan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahad, solichim. 2017. Analisis Kebijakan : *Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model implementasi Kebijakan Publik Volume 6, Jakarta:*

Aisyah. Nurul Dewi, Nurcahyanto. Herbasuki dan Santoso, Slamet. 2015. *Implementasi Program Beras Raskin Miskin (Raskin) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Jurnal Artikel. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Diponegoro.*

Amali, Yusril Azri. Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Talango Kabupaten SUMENEP. Diss. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, 2020.

Anderson dalam Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alabeta,2008.

Abdul Rasyid, (2014). *Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) Di Keluaran Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun 2012-2014.* Halaman 1-5.

Cahyono, Anjar. 2015. *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.*

Grindle dalam Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI.2006.

Hardayani, Yorry. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembagian Sembako Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid 19 di Kota Bengkulu." *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)* 3.2 (2021): 1-11.

Kukuh Riyanto, *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beras Untuk Keluarga Miskin, Membahas Tentang Bagaimana Kriteria-Kriteria Penerima Beras Miskin (Raskin)*, Solo,2009

Risal, Posumah dan Burhanuddin .2013. *Hubungan Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.Acta Diurna*

Supriatna, Encup & Ristnti, Rira.2018. *Implementasi Kebijakan Program Beras Sejahtera di Kabupaten Sampang.*

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar),2005.

Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Taufiq, Yudisa Suryadirta. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka*.

Puji Astuti, Rina'' *Studi Tentang Pelaksanaan Program Program Raskin bagi Keluarga Miskin di Desa Makmur Kecamatan Babulu Kabupaten Panajam Paser Utara''*.Skripsi

Van Meter Dan Van Horn Dalam Nawawi Ismail, *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*, (Surabaya: PMN), 2009

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Rebulik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang menjadi Dasar Hukum Program Sembako yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai alat untuk mendapatkan bantuan tersebut.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



Kantor Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang

Bedagai (Rabu, 16 Maret 2022)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informasi kunci yaitu Bapak Suhardi, selaku Kepala Desa Blok Sepulu Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (Rabu 16 Maret 2022 Pukul 11:30 WIB)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Ibu Epi Aspita, selaku Sekretaris Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 13:30 WIB)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Ibu Basaria Sihombing sebagai masyarakat penerima Sembako di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 11:30 WIB)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Ibu Rose Sihombing sebagai masyarakat penerima Program Sembako di Desa Blok Sepuluh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai (Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 10:30 WIB)

Lampiran 2 : Data Informan

1. Informan Kunci

Nama : Suhardi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 50 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Di Blok Sepuluh

2. Informan Utama

Nama : Epi Aspita
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 34 Tahun
Jabatan : Sekretaris Desa Di Blok Sepuluh

3. Informan Utama

Nama : Manganju Siregar
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 40 Tahun
Jabatan : Kepala Dusun Blok IX

4. Informan Tambahan

Nama : Basaria Sihombing
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 58 Tahun
pekerjaan : Bertani

5. Informan Tambahan

Nama : Basaria Sihombing
Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 50 Tahun

pekerjaan : Bertani

6. Informan Tambahan

Nama : Herti Simamora

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 38 Tahun

Pekerjaan : Bertani

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk informan kunci yaitu kepala Desa Blok Sepuluh

1. Apa saja hambatan di Kantor Desa Blok Sepuluh dalam Implementasi Program Sembako ?
2. Bagaimana pihak petugas pelaksana program Sembako apakah pernah memberikan penyuluhan/sosialisasi tentang program Sembako ?
3. Apa saja syarat penerima Program Sembako ?
4. Siapa saja penerima Program Sembako ?
5. Bagaimana sikap pelaksana terhadap program raskin apakah sudah berjalan dengan baik ?

Daftar pertanyaan untuk informan utama yaitu sekretaris Desa Blok Sepuluh

1. Bagaimana melakukan pendataan warga miskin yang layak dan yang tidak layak untuk mendapatkan sembako ?
2. Apakah masih ada warga yang miskin yang tidak menerima program

Sembako ini ?

3. Bagaimana pelaksanaan program Sembako apakah sudah tepat waktu dan apakah pernah terlambat ?
4. Bagaimana kualitas beras yang diterima apakah sudah bagus ?
5. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam melakukan program Sembako ini ?

Daftar pertanyaan untuk informan tambahan yaitu masyarakat Desa Blok Sepuluh.

1. Apakah anda pernah mendapat bantuan program Sembako?
2. Bagaimana perasaan anda Ketika menerima bantuan Sembako ?
3. Bagaimana kualitas beras yang anda terima apakah sudah bagus ?
4. Bagaimana pendapat anda tentang petugas program pelaksana Sembako apakah sudah melayani dengan baik ?
5. Apakah menurut anda proses pendataan bantuan yang dilakukan pemerintah sudah berjalan efektif ?